

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT

Maret 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT

Maret 2017



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT MARET 2017

Katalog : 3205011.32
No. Publikasi : 32520.1706
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii+18 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh :

CV.Filindo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT MARET 2017

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Umum : Ir. Dody Herlando, M.Econ

Penanggung Jawab Teknis : Ir. Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si

Penulis & Pengolah Data : Esti Suciningtyas Pratiwi, S.ST

Penyunting/Editor : 1. Yayat Hidayat, S.ST, M.Stat.
2. Nani Komalasari, SE

KATA PENGANTAR

Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Untuk membuat suatu kebijakan yang tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu data kemiskinan yang menyeluruh.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat telah merilis tingkat kemiskinan makro provinsi sejak tahun 2007. Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu keadaan bulan Maret dan bulan September. Untuk melengkapi ulasan yang disajikan pada Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Barat menyusun laporan eksekutif yang mengupas lebih dalam data kemiskinan. Laporan eksekutif BRS kemiskinan keadaan Maret 2017, disajikan dalam bentuk publikasi "Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Maret 2017".

Diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat.

Bandung, September 2017

Kepala,



Dody Herlando

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
I. Pendahuluan	1
II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 - Maret 2017)	3
III. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2016 - 2017	7
IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	12
V Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 - 2017)	15
VI. Penutup	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat Menurut Daerah Maret 2016 – Maret 2017	3
Tabel 2.	Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan, Maret 2017	10

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah (Maret 2016 – 2017)	4
Gambar 2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (Maret 2017)	5
Gambar 3.	Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 – Maret 2017)	7
Gambar 4.	Perkembangan Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Barat pada Maret 2017	8
Gambar 5.	Peranan Komoditi Makanan dan Non Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada Maret 2017	9
Gambar 6.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 – Maret 2017)	13
Gambar 7.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 – Maret 2017)	14
Gambar 8.	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah (Maret 2016 – 2017)	15
Gambar 9.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat pada Maret 2017	17

I. Pendahuluan

Salah satu poin kesepakatan dari seluruh bangsa di dunia yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan sampai pada pertengahan tahun 2015. Di berbagai Negara, upaya untuk menekan angka kemiskinan juga masih belum menunjukkan capaian yang memuaskan. Hingga pada bulan September 2015, para pemimpin dunia menyepakati tujuan pembangunan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), dan kemiskinan masih merupakan salah satu poin penting yang ada dalam SDGs.

Kemiskinan sebagai salah satu poin untuk mengukur tingkat keberhasilan MDGs dan SDGS di suatu Negara. Namun, untuk mengukur kemiskinan diperlukan suatu konsep yang jelas. BPS sendiri memakai konsep kemiskinan yang dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Kemiskinan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan,

minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber data utama dalam menghitung Garis Kemiskinan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Garis Kemiskinan yang dihasilkan hanya menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk secara makro dikarenakan sumber data yang dipakai hanya berdasarkan survei. Kemiskinan makro ini tidak dapat menggambarkan siapa dan keberadaan penduduk miskin tersebut. Namun demikian, kemiskinan makro dapat digunakan untuk menggambarkan kemiskinan di suatu daerah serta membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tersebut dan juga bisa untuk evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Selama ini, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sudah dengan gencar melakukan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang begitu besar pun digulirkan untuk program pengentasan kemiskinan. Namun, berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi tidak efektif manakala di satu sisi pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dengan kemiskinan seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, kenaikan tarif dasar listrik serta akses infrastruktur yang kadang menghambat penduduk untuk mendapatkan informasi dan pelayanan umum baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya. Kondisi seperti ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat yang secara geografis dekat dengan ibukota Negara Republik Indonesia.

II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 – Maret 2017)

Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu bulan Maret 2016 – Maret 2017 di Jawa Barat menunjukkan cenderung menurun. Pada keadaan Maret 2016, persentase penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 8,95 persen (4,22 juta jiwa). Dan pada keadaan September 2016 mengalami penurunan sebesar 0,18 poin menjadi 8,77 persen (4,17 juta jiwa). Penurunan yang terjadi selama kurun waktu Maret – September 2016 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Jawa Barat mengalami perubahan ke arah yang positif.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat Menurut Daerah Maret 2016 – Maret 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
[1]	[2]	[3]
Perkotaan		
Maret 2016	2.5	7.67
September 2016	2.54	7.55
Maret 2017	2.59	7.52
Perdesaan		
Maret 2016	1.73	11.80
September 2016	1.62	11.72
Maret 2017	1.58	11.75
Perkotaan + Desa		
Maret 2016	4.22	8.95
September 2016	4.17	8.77
Maret 2017	4.17	8.71

Sumber : Data Susenas 2016-2017

Kemudian pada Maret 2017, persentase penduduk miskin di Jawa Barat kembali mengalami penurunan sebesar 0,06 poin dibandingkan keadaan September 2016. Jika dilihat selama kurun waktu Maret 2016 - Maret 2017, persentase penduduk miskin Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,24 poin. Hal ini menunjukkan

perkembangan yang cukup baik, dalam arti pemerintah telah berhasil dalam program pengentasan kemiskinan selama periode Maret 2016 – Maret 2017.

Dalam kurun waktu setahun terakhir secara absolut selama periode Maret 2016 – Maret 2017, penduduk miskin Jawa Barat di daerah perdesaan berkurang 146,91 ribu jiwa (dari 1,73 juta jiwa menjadi 1,58 juta jiwa). Sementara itu di perkotaan secara absolut mengalami kenaikan sebanyak 91,03 ribu jiwa (dari 2,5 juta jiwa menjadi 2,59 juta jiwa).

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Menurut Klasifikasi Daerah (Maret 2016 – 2017)

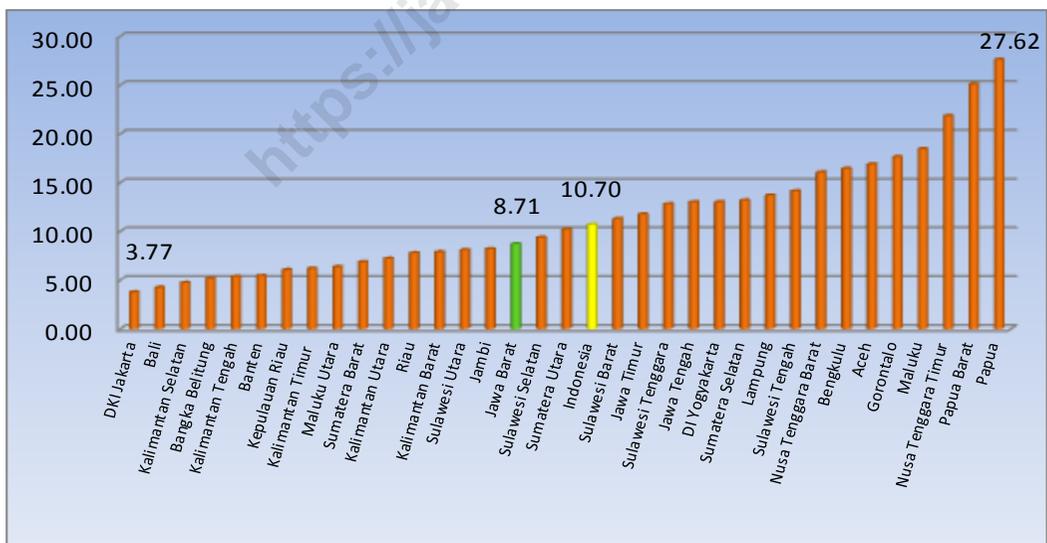


Sumber : Data Susenas 2016-2017

Jika dilihat dari persentase, selama periode Maret 2016 – Maret 2017, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar 0,05 persen (11,80 persen menjadi 11,75 persen). Begitu juga di daerah perkotaan turun 0,15 poin (dari 7,57 persen menjadi 7,52 persen). Untuk periode September 2016 – Maret 2017, penduduk miskin di perdesaan mengalami kenaikan 0,03 poin (dari 11,72 persen menjadi 11,75 persen) dan mengalami penurunan di perkotaan sebesar 0,03 poin yaitu dari 7,55

persen menjadi 7,52 persen (Gambar 1). Secara umum, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Salah satu penyebabnya dikarenakan akses dan infrastruktur yang belum memadai di daerah perdesaan. Selain itu, bisa dimungkinkan karena kualitas sumber daya manusia di perdesaan masih lebih rendah dibandingkan perkotaan. Namun demikian, perbedaan perkembangan kemiskinan di perdesaan selama kurun waktu Maret 2016 – Maret 2017 semakin menyempit. Ini menunjukkan bahwa ada perbaikan perekonomian di daerah perdesaan. Dari gambaran kondisi ini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah harus bisa mengendalikan stabilitas harga khususnya kebutuhan pokok sehingga kemampuan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Indonesia (Maret 2017)



Sumber : Data Susenas 2017

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Indonesia, posisi Jawa Barat pada Maret 2017 berada di atas angka nasional. Jika dilihat dari urutan persentase penduduk miskin yang terkecil, Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-16. Adapun persentase penduduk miskin yang terendah di Indonesia ditempati Provinsi DKI Jakarta dengan angka 3,77 persen dan yang terbesar yaitu Provinsi Papua dengan 27,62 persen. Jika dilihat dari provinsi yang ada di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga terkecil setelah DKI Jakarta dan Banten (Gambar 2).

Penurunan persentase penduduk miskin cenderung melambat dari 8,77 persen pada September 2016 menjadi 8,71 persen pada Maret 2017. Salah satunya dikarenakan adanya penurunan harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan sebesar Rp 507,- yaitu dari Rp 8.450,- pada September 2016 menjadi Rp 7.943,- pada Maret 2017, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa lebih mudah untuk memperoleh beras. Sedangkan rata-rata harga gabah kualitas rendah di tingkat petani mengalami kenaikan Rp 345.68,- per kg yang tentu saja memberikan keuntungan lebih bagi para petani yang pada umumnya berpenghasilan rendah.

Penurunan persentase kemiskinan yang rendah ini (0,06 persen), patut diduga bahwa program pemerintah di bidang ekonomi masih menemui beberapa kendala. Hal ini digambarkan dari data makro ekonomi yang tidak mendukung penurunan persentase penduduk miskin yang signifikan, diantaranya :

1. Inflasi secara umum September 2016 – Maret 2017 Jawa Barat sebesar 2,21. Ini mengalami peningkatan dibandingkan periode Maret 2016 – September 2016 yang hanya 1,12.

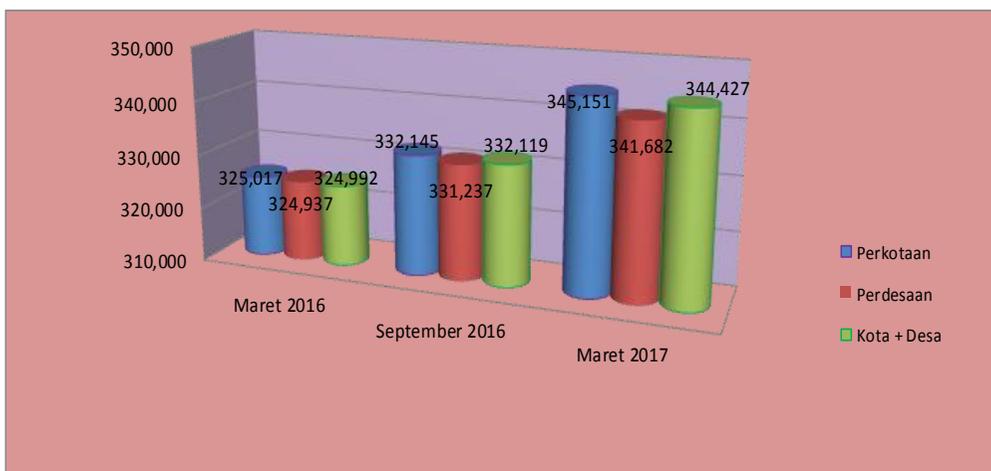
2. Adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 1,78 poin dari 104,15 pada September 2016 menjadi 102,37 pada Maret 2017.
3. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama September 2016 – Maret 2017 melambat 0,71 persen.

Apabila hal-hal di atas tidak terjadi, besar kemungkinan persentase penurunan penduduk miskin akan semakin tinggi atau lebih dari 0,06 persen.

III. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2016 - 2017

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu setahun dari Maret 2016 - 2017, Garis Kemiskinan naik dari Rp. 324.992,- pada Maret 2016 menjadi Rp. 344.427,- pada Maret 2017.

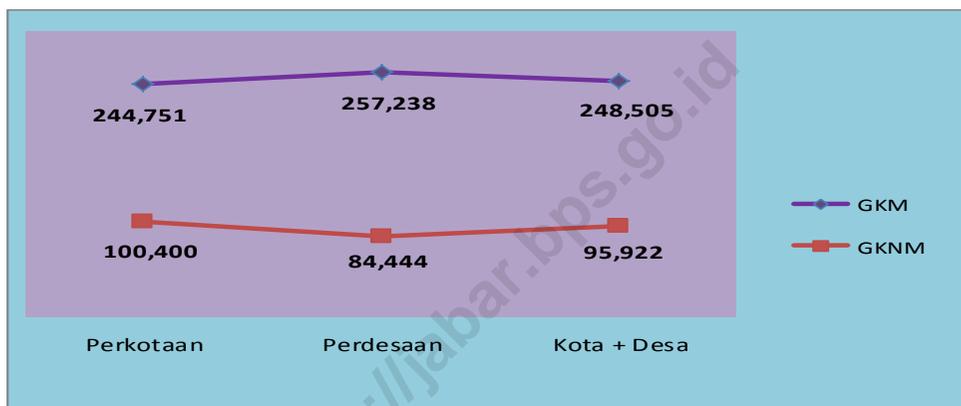
Gambar 3. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 – Maret 2017)



Sumber : Data Susenas 2016-2017

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, Garis Kemiskinan perkotaan kenaikannya lebih tinggi yaitu dari Rp. 325.017,- pada Maret 2016 menjadi Rp. 345.151,- pada Maret 2017. Sedangkan Garis Kemiskinan perdesaan mengalami kenaikan dari Rp 324.937,- di Maret 2016 menjadi Rp. 341.682,- pada Maret 2017 (Gambar 3).

Gambar 4. Perkembangan Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Barat pada Maret 2017



Sumber : Data Susenas 2017

Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada Maret 2017, secara total Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 248.505,- dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp 95.922,-. Jika dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, Garis Kemiskinan Makanan di perdesaan (Rp 257.238,-) lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Makanan di perkotaan (Rp 244.751,-). Tetapi sebaliknya, untuk Garis Kemiskinan Non Makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (Rp 100.400,-) berbanding Rp 84.444,- (Gambar 4).

Berdasarkan GK, tingkatan kemiskinan penduduk dapat dipilah menjadi 4 :

- Sangat Miskin (SM) : pendapatan/kapita/bulan \leq 0,8 GK
- Miskin (M) : 0,8 GK < pendapatan/kapita/bulan \leq GK
- Hampir Miskin (HM) : GK < pendapatan/kapita/bulan \leq 1,2 GK
- Rentan Miskin Lainnya (RML) : 1,2 GK < pendapatan/kapita/bulan \leq 1,6 GK

Untuk membandingkan angka kemiskinan antar Negara, Bank Dunia menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversikan ke dalam US\$ PPP (*Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli), bukan nilai tukar US\$ resmi. Angka konversi PPP ini menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$ 1 di Amerika. Ukuran Bank Dunia ini memilah dua batasan penduduk miskin yaitu di bawah US\$ 1 PPP per kapita per hari dan di bawah US\$ 2 PPP per kapita per hari. Pada tahun 2017, US\$ 1 PPP setara dengan Rp 8.521,-. Apabila dikonversikan, maka pada Maret 2017 Garis Kemiskinan di Jawa Barat itu setara dengan US\$ 1,35 PPP.

Gambar 5. Peranan Komoditi Makanan dan Non Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada Maret 2017



Sumber : Data Susenas 2017

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sangat dominan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih dominan untuk pengeluaran kebutuhan makanan dibandingkan non makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 70,91 persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan sebesar 75,29 persen. Secara total peranan komoditi makanan terhadap GK adalah sebesar 72,15 persen (Gambar 5).

Tabel 2. Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan, Maret 2017

Komoditi		Kota	Komoditi	Desa
(1)		(2)	(3)	(4)
Makanan				
1	Beras	23.20	Beras	28.15
2	Rokok kretek filter	11.83	Rokok kretek filter	10.71
3	Daging ayam ras	4.47	Roti	3.68
4	Telur ayam ras	4.02	Telur ayam ras	3.17
5	Mie Instan	3.11	Daging ayam ras	3.05
Non Makanan				
1	Perumahan	9.43	Perumahan	9.11
2	Bensin	3.79	Bensin	2.31
3	Listrik	3.06	Listrik	1.82
4	Pendidikan	2.02	Pendidikan	1.26
5	Angkutan	1.96	Angkutan	1.15

Sumber : Data Susenas 2017

Jika dilihat pada komoditi yang menjadi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan pada Maret 2017 baik itu di daerah perkotaan maupun di perdesaan, beras menjadi komoditi dengan urutan pertama. Di perkotaan, beras mencapai angka 23,20 persen sedang di perdesaan bisa mencapai 28,15 persen. Hal ini dikarenakan makanan utama dari sebagian besar

penduduk Indonesia adalah beras, sehingga menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga beras.

Posisi kedua terbesar sebagai penyumbang Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sebenarnya kalau dilihat makanan yang menghasilkan kalori, rokok kretek tidak termasuk dalam hal ini. Namun karena rokok kretek ini banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin sehingga tetap dimasukkan dalam penghitungan Garis Kemiskinan. Komoditi rokok kretek filter memberikan sumbangan sebesar 11,83 persen untuk daerah perkotaan dan 10,71 persen di perdesaan.

Untuk komoditi selanjutnya terdapat perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, daging ayam ras menempati urutan ketiga dengan 4,47 persen menyumbang Garis Kemiskinan. Komoditi yang menyumbang Garis Kemiskinan selanjutnya di perkotaan adalah telur ayam ras (4,02 persen) dan mie instan (3,11 persen). Sedangkan di perdesaan, komoditi selanjutnya setelah rokok kretek adalah roti (3,68 persen), diikuti oleh telur ayam ras (3,17 persen) dan daging ayam ras di urutan kelima dengan 3,05 persen.

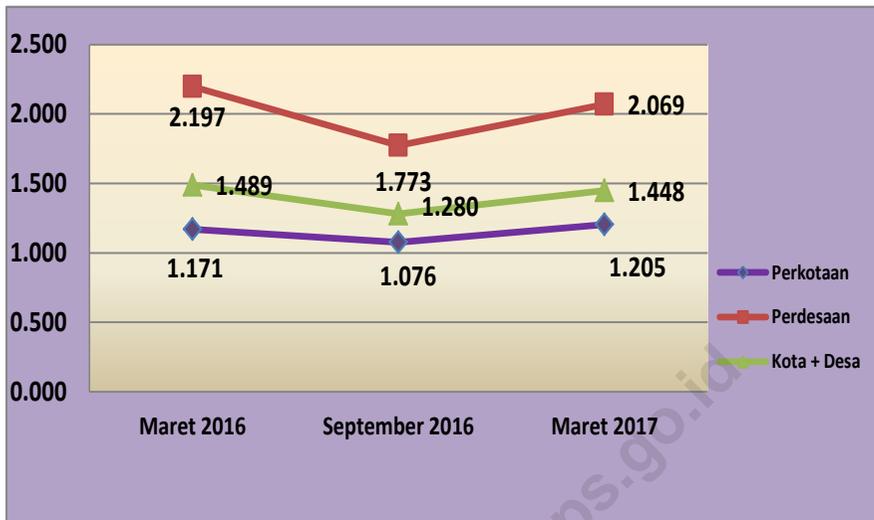
Untuk komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah perumahan yaitu sebesar 9,43 persen, bensin 3,79 persen, listrik 3,06 persen, pendidikan 2,02 persen dan angkutan sebesar 1,96 persen. Sedangkan lima komoditi bukan makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perdesaan secara berturut-turut adalah perumahan yaitu sebesar 9,11 persen, bensin 2,31 persen, listrik 1,82 persen, pendidikan sebesar 1,26 persen, dan angkutan 1,15 persen.

IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedang Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 – Maret 2017)



Sumber : Data Susenas 2016-2017

Pada periode Maret 2016 - 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Barat menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun tipis dari 1,489 pada keadaan Maret 2016 menjadi 1,448 pada keadaan Maret 2017. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan. Untuk wilayah perdesaan indeks kedalaman kemiskinan (P1) juga mengalami penurunan yaitu dari 2,197 pada bulan Maret 2016 turun menjadi 2,069 pada bulan Maret 2017. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di wilayah perkotaan mengalami kenaikan yakni dari 1,171 pada Maret 2016 menjadi 1,205 pada Maret 2017 yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung menjauhi garis kemiskinan (Gambar 6). Walaupun ada kenaikan nilai Indeks P1 di perkotaan, Indeks P1 di perkotaan pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan P1 di

perdesaan. Ini bisa menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik daripada di perdesaan.

Gambar 7. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 – Maret 2017)



Sumber : Data Susenas 2016-2017

Dari hasil Susenas 2017, pada keadaan bulan Maret 2017 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat mencapai 0,374. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,098 poin dibandingkan pada September 2016 (0,276). Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung melebar. Selama kurun waktu Maret 2016 – 2017, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami fluktuasi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) di wilayah perdesaan turun dari 0,624 pada bulan Maret 2016 turun menjadi 0,540 pada bulan Maret 2017. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan naik dari 0,259 pada bulan Maret 2016 menjadi 0,309 pada bulan Maret 2017 (Gambar 7).

V. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (Maret 2016 – 2017)

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat adalah distribusi pendapatan penduduk. Dikarenakan data mengenai pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi pendapatan selama ini menggunakan pendekatan data pengeluaran. Banyak ukuran yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, salah satunya dengan Gini Ratio. Nilai Gini Ratio ini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Gambar 8. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat Menurut Klasifikasi Daerah (Maret 2016 – 2017)



Sumber : Data Susenas 2016-2017

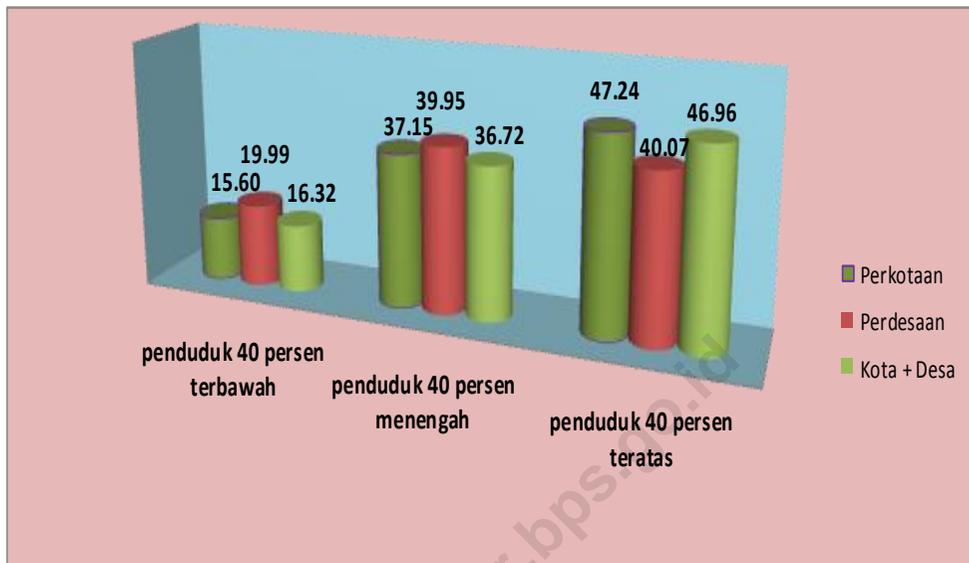
Perkembangan nilai Gini Ratio Provinsi Jawa Barat periode Maret 2016 – 2017 mengalami penurunan, ini merupakan hal yang baik. Dengan semakin menurunnya nilai Gini Ratio ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Jawa Barat semakin merata. Pada Maret 2016, nilai Gini Ratio Provinsi Jawa Barat sebesar 0,413 dan menurun pada September

2016 di 0,402. Pada bulan Maret 2017, nilai Gini Ratio mengalami kenaikan dibandingkan September 2016 yaitu menjadi sebesar 0,403.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, dalam kurun waktu Maret 2016 – 2017, daerah perkotaan cenderung mengalami penurunan angka Gini Ratio dari 0,423 pada bulan Maret 2016 turun ke 0,412 di September 2016 dan begitu pula pada kondisi Maret 2017 yang tidak mengalami perubahan dengan nilai 0,412. Namun lain halnya dengan perkembangan Gini Ratio wilayah pedesaan yang cenderung berfluktuatif angkanya. Pada Maret 2016, nilai Gini Ratio di pedesaan sebesar 0,317 turun menjadi 0,31 pada September 2016 dan kemudian naik lagi 0,324 pada bulan Maret 2017.

Selain menggunakan Gini Ratio, salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah itu nilainya ada di bawah 12 persen, kemudian ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen serta ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.

Gambar 9. Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat pada Maret 2017



Sumber : Data Susenas 2017

Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 15,60 persen. Ini Berarti penduduk di perkotaan tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara di daerah pedesaan termasuk kategori ketimpangan rendah dengan angka persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 19,99 persen. Namun kalau dilihat secara umum, pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat, persentase pengeluarannya ada pada kategori ketimpangan sedang dengan 16,32 persen.

VI. Penutup

Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 4,17 juta jiwa (8,71 persen). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,06 persen jika dibandingkan keadaan bulan September 2016.

Adapun Garis Kemiskinan (GK) Jawa Barat pada bulan Maret 2017 sebesar Rp 344.427,- per kapita per bulan. Ini mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi September 2016 (Rp 332.119,-). Pada bulan Maret 2017, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan (GK) masih mendominasi dibandingkan komoditi bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 72,15 persen.

Pada periode Maret 2016 - 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan yang mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan.. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada periode Maret 2016 – 2017 menunjukkan peningkatan, yang berarti bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung melebar

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan PHH. Mustafa No. 43, Bandung
Telp. (022) 7272595 - 7201696
<http://www.jabar.bps.go.id>